BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Sejarah perusahaan

PT. BPR KARYAJATNIKA SADAYA berdiri pada tanggal 14 September 1990 berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris Imas Tarwiyah Soedrajat, SH, berkedudukan di Kabupaten Bandung, dengan modal dasar pada saat itu berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Melihat potensi yang dimiliki, maka pada Tahun 1999 PT. BPR Karyajatnika Sadaya mengajukan permohonan pindah alamat ke Kotamadya Bandung. Berdasarkan izin dari Bank Indonesia No.1/318/CPBPR/IDBPR/Bd Tanggal 16 Desember 1999, maka pada Tanggal 30 Desember PT. BPR Karyajatnika Sadaya resmi pindah alamat ke kotamadya Bandung, tepatnya di Jl. Abdurachman Saleh No. 2 Bandung, yang saat ini beroperasi sebagai kantor pusat.

Didukung komitmen bersama segenap pemegang saham dan pengurus serta staff menjadikan PT. BPR Karyajatnika Sadaya sebagai suatu perusahaan yang berkembang pesat dan mampu bersaing di dunia perbankan. Tahun 2001 PT. BPR Karyajatnika Sadaya mulai membenahi infrastruktur dengan menerapkan S.O.P (Standard Operating Procedure) dan standarisasi pelayanan di semua cabang-cabang PT. BPR Karyajatnika

Sadaya. Tahun 2003 PT. BPR Karyajatnika Sadaya memperoleh sertifikasi ISO versi 9001-2000 untuk Core Banking dari Badan Sertifikasi SAI Global (ANZ) dengan nomor registrasi QEC 20588.

4.1.2 Struktur Organisasi PT. BPR Karyajatnika Sadaya

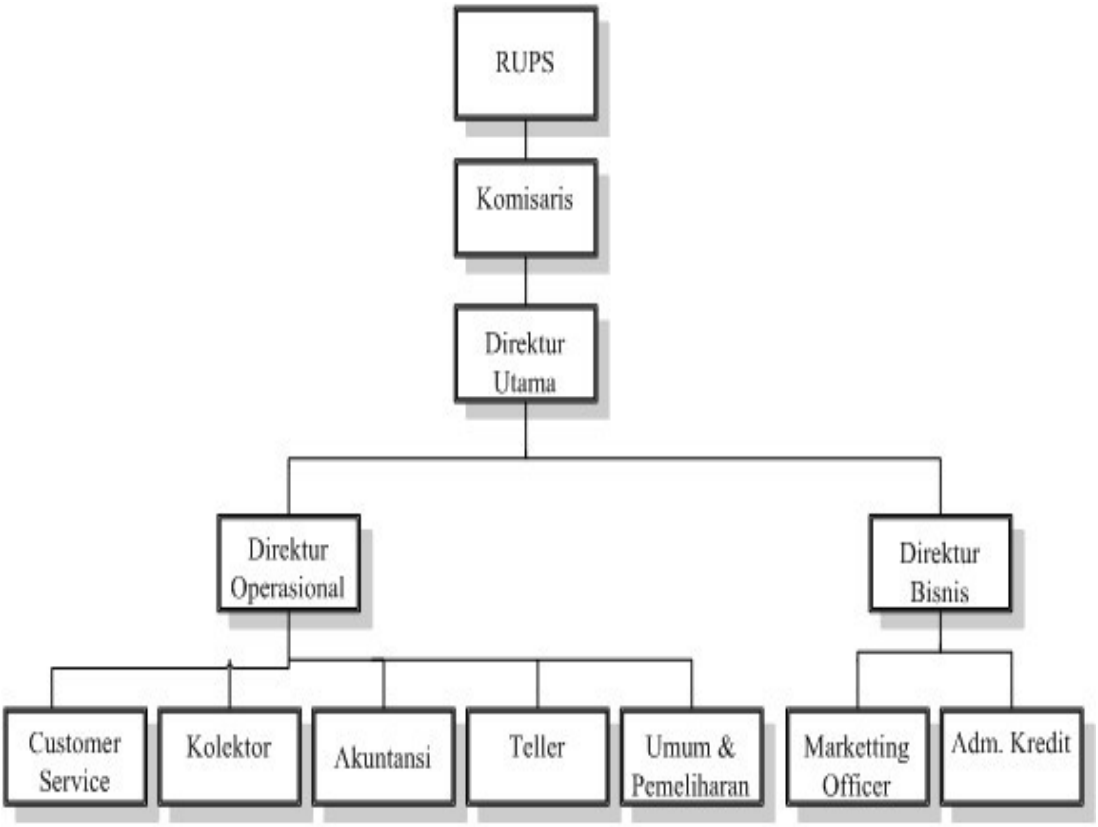
Struktur Organisasi merupakan suatu rangkaian susunan pekerjaan yang diatur dan dibagikan diantara para anggota organisasi, sehingga suatu proses tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Proses ini menyangkut tiga langkah utama :

1. Perincian seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan yang secara logis.
3. Pembentukan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota.

Dengan adanya penyusunan organisasi tersebut sebuah perusahaan atau bank dalam kegiatannya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Tanggung jawab dari setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing sangat menentukan dalam terwujudnya suatu kebersamaan yang serasi dan mencapai hasil yang memuaskan.

Struktur organisasi PT.BPR Karyajatnika Sadaya penyusunan organisasi tersebut berdasarkan pada kebutuhan yang ada di dalam PT.BPR Karyajatnika Sadaya dan merupakan suatu pola yang

menggambarkan hubungan antara fungsi jabatan dengan aktifitas dalam suatu organisasi seperti terlihat dalam gambar dibawah ini.



Sumber : PT. BPR Karyajatnika Sadaya Cabang Dago Bandung.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT.BPR Karyajatnika Sadaya Cabang Dago Bandung

4.1.3 Deskripsi Tugas

Berdasarkan struktur organisasi tersebut tugas masing-masing bagian yang ada pada PT. Bank Perkreditan Rakyat KS dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

   Merupakan organ tertinggi dan sangat berkuasa dalam memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan berkaitan dengan kepentingan jalannya perseroan.

2. Komisaris

   Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota komisaris dan seorang diangkat sebagai komisaris utama oleh RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Komisaris melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

3. Direktur Utama (Direksi)

   Direktur bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengurusan perseroan (PT. Bank Perkreditan Rakyat KS) untuk kepentingan dan dalam segala tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

4. Direktur Operasional

   Membuat rencana penyaluran kredit kepada nasabah yang sudah terdeteksi dengan baik, dan melakukan koordinasi dan mengawasi seksi-seksi yang berada di bawahnya.

5. Customer Service

   Melaksanakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dan mendukung bidang Administrasi Umum dan Pelayanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat KS serta tugas lain yang diberikan oleh Direktur Operasional dan Direktur Utama.

6. Teller

   Melaksanakan berbagai pekerjaan yang mendukung bidang kas Bank Perkreditan Rakyat KS dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Operasional dan Direktur Utama.

7. Kolektor

   Melaksanakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dan mendukung bidang kolektor/*cash collection* serta tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Operasional dan atau Direktur Utama.

8. Marketing Officer

   Melaksanakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dan mendukung segi pemasaran produk Bank Perkreditan Rakyat KS baik dana maupun kredit serta produk jasa Bank Perkreditan Rakyat KS lainnya dan tugas yang diberikan oleh Direktur Operasional dan Direktur Utama.

9. Administrasi Kredit

   Melaksanakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dan mendukung segi Administrasi Kredit dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Operasional dan Direktur Utama.

10. Akuntansi

    Melaksanakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dan mendukung bidang Umum, Pelayanan, dan *Accounting/*Pembukuan Bank Perkreditan Rakyat KS serta tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Operasional dan atau Direktur Utama.

11. Bagian Umum dan Pemeliharaan

Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dan mendukung bidang Umum dan Pemeliharaan Gedung Kantor serta Barang-barang Inventaris milik Bank Perkreditan Rakyat KS juga tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Operasional dan Direktur Utama.

4.1.4 Aktivitas PT.BPR Karyajatnika Sadaya

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa Bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa Bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.

Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk :
   a. Simpanan tabungan
   b. Simpanan deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk :
   a. Kredit investasi
   b. Kredit Modal kerja
   c. Kredit Perdagangan

Karena keterbatasan yang di miliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Menerima simpanan Giro

b. Mengikuti kliring

c. Melakukan kegiatan valuta asing

d. Melakukan kegiatan perasuransian

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Perkembangan Kredit Bermasalah

Dalam memberikan kredit pihak bank sering mengalami kendala seperti nasabah yang diberikan pinjaman tidak membayar kewajibannya, sehingga terjadi kredit bermasalah. Dari data yang diperoleh dapat dilihat perkembangan kredit bermasalah yang terjadi pada PT.BPR KS periode tahun 2007 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.1
Perkembangan (*Non Perfoming Loan*) kredit bermasalah
PT Bank Perkreditan Rakyat Karyajatnika Sadaya Cabang Dago Bandung
(Dalam Ribuan)

Tahun	Total Kredit yang diberikan	Kredit bermasalah	NPL	Perkembangan
2007	141,563,287	2,265,012	1,6%	-
2008	150,473,288	5,417,038	3,6 %	1,25%
2009	148,824,513	4,613,560	3,1 %	(0,13%)
2010	156,124,356	3,590,859	2,3 %	(0,25%)

Sumber : NPL PT BPR Karyajatnika Sadaya, diolah kembali.

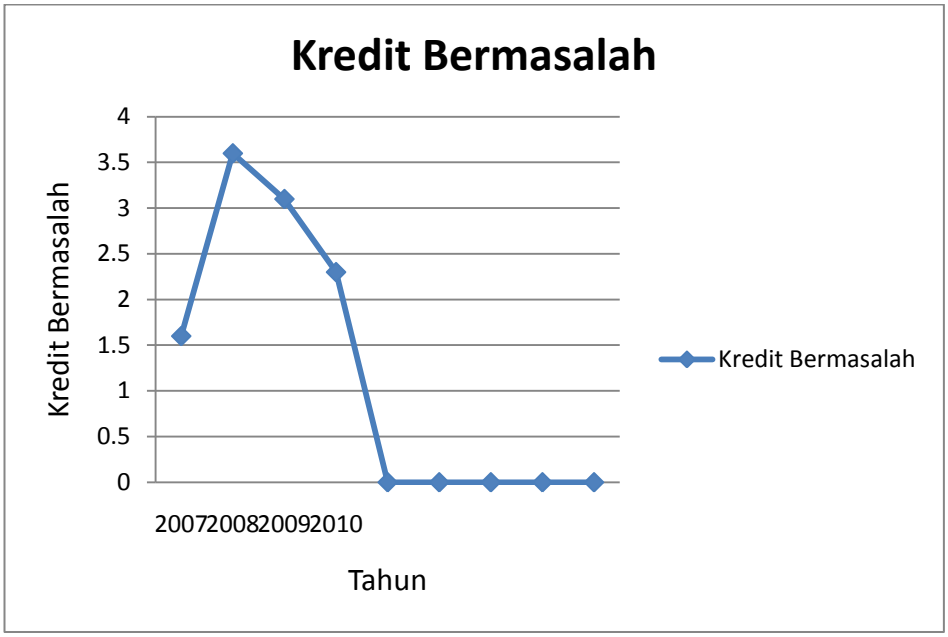
Untuk mengetahui perhitungan NPL pada tahun 2007 – 2010 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit Yang Diberikan}} \text{ x } 100\%$$

Berdasarkan tabel 4.1 , maka dapat dianalisa bahwa NPL dari tahun 2007 – 2008 terjadi kenaikan sebesar 2% dan dilihat dari perkembangannya mengalami kenaikan sebesar 1,25%, sedangkan dari tahun 2008 – 2009 NPL mengalami penurunan sebesar 0,5 % dan perkembangannya mengalami penurunan sebesar (0,13%) dan yang terakhir dari tahun 2009 – 2010 NPL mengalami penurunan sebesar 0,8% dan perkembangannya juga mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar (0,25%).

Data yang penulis peroleh perkembangan kredit bermasalah yang mengalami peningkatan terjadi pada tahun 2008 , hal ini diakibatkan karena jumlah pemberian kredit pada tahun tersebut meningkat sehingga kredit bermasalah cenderung naik serta dari analisis kredit yang kurang berperan baik dalam melaksanakan tugasnya yang sebagian besar ditimbulkan dari nasabah yang sengaja maupun tidak sengaja atau tidak mampu membayar kredit seperti biasanya.

Berdasarkan data diatas perkembangan kredit bermasalah (*Non Performing Loan)* pada PT. BPR Karyajatnika sadaya cabang dago bandung selama empat tahun dapat dilihat dalam garfik dibawah ini :



Gambar 4.2
Grafik Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

4.2.2 Faktor – Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Berdasarkan hasil observasi pada PT.BPR KS penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut.

1. Faktor dari sisi Debitur,antara lain :
    a. Adanya itikad yang tidak baik dari debitur
    b. Usaha yang dijalankan debitur banyak pesaing.
    c. Menurunnya usaha dari debitur yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar.
    d. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula.
2. Faktor dari intern PT.BPR KS , antara lain :
    a. Itikad tidak baik dari petugas BPR

b. Kekurang mampuan petugas BPR dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan kredit dicairkan.

c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas BPR dalam membina debitur.

3. Faktor dari ekstern PT.BPR KS , antara lain :

a. Perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, kenaikan harga / biaya-biaya yang berpengaruh secara langsung terhadap usaha debitur

b. Debitur mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)

c. Keadaan alam yang menimpa debitur antara lain : banjir , kebakaran , dan lain sebagainnya.

Dari hasil penelitian pada Bank BPR KS dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada Bank BPR KS yaitu faktor internal bank seperti kebijakan kredit yang kurang menunjang, faktor eksternal seperti peraturan pemerintah yang kurang menunjang, dan faktor debitur seperti adanya itikad yang tidak baik dari debitur.

Upaya penanganan kredit bermasalah yang dilakukan PT.BPR KS sebagai berikut :

1. Penggolongan Kredit

Kriteria penggolonagan kredit berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI dan Surat Intrruksi Direksi tentang cara pengklasifikasian kolektibilitas kredit, terbagi menjadi 5 kualitas yaitu :

a. Lancar

b. Dalam Perhatian Khusus

c. Kurang Lancar

d. Diragukan

e. Macet

2. Prosedur Penyelesaian Kredit bermasalah

a. Dalam jangka waktu 2 hari setelah jatuh tempo pihak bank mengkonfirmasikan melalui telepon bahwa nasabah tersebut mengalami keterlambatan pembayaran yang menimbulkan kredit bermasalah.

b. Apabila dalam tenggang waktu 1 bulan nasabah belum juga bayar maka pihak bank mengirimkan kolektor untuk mendatangi rumah nasabah untuk menagih.

c. Apabila dalam tenggang waktu 2 bulan masih belum bisa bayar maka pihak bank berhak menarik barang jaminan seperti yang tertera pada perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya oleh nasabah tersebut.